

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program BSPS ini seperti:

- a. Penyiapan kelompok penerima bantuan, yaitu dimana masyarakat menentukan struktur kelompok mereka masing-masing sebagai penerima bantuan dan aktif melaksanakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti kegiatan rembuk warga, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan,
- b. Berupaya dalam memenuhi swadaya, yaitu masyarakat yang mengikuti program BSPS ini harus memiliki swadaya untuk menunjang pelaksanaan program pada rumah mereka masing-masing guna menutupi kekurangan dari dana yang disediakan oleh program. Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan uang dari hasil tabungan, bantuan keluarga, hingga meminjam dari masyarakat lain dan juga menggadaikan benda berharga yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat juga berswadaya melalui material bahan bangunan yang mereka miliki sebelumnya dan memanfaatkan tenaga untuk ikut serta mengerjakan rumah mereka sendiri.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan perbaikan rumah, masyarakat terlibat dan mengambil keputusan terkait bagaimana bentuk rumah mereka yang akan diperbaiki dengan memberikan saran, ide, dan

masukannya kepada fasilitator lapangan dan masyarakat mengambil keputusan terkait sistem pembangunan rumah yaitu apakah rumah tersebut hanya sebatas renovasi atau pembangunan baru. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam proses ini dengan melakukan analisis kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan biaya dan kemampuan yang tersedia.

- d. Penentuan tukang atau pekerja, masyarakat sebagai pemilik rumah diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan tukang atau pekerja yang akan memperbaiki rumah mereka, sehingga dari hal ini memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan program BPS di rumah mereka masing-masing.
2. Dalam pelaksanaan proses partisipasi, masyarakat sebagai penerima program BPS di Kelurahan Gates Nan XX diuraikan sesuai tahap pelaksanaan program yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan.
 - a. Tahap persiapan dalam prosesnya belum melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahap ini proses pelaksanaan program BPS mengenai sistem administrasi yang sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan sebagai penyelenggara program BPS di Provinsi Sumatera Barat
 - b. Tahap Perencanaan, dalam prosesnya pada tahap ini sudah melibatkan masyarakat dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengorganisasian kelompok dan ikut serta dalam perancangan perbaikan rumah mereka

masing-masing. Tetapi kendala yang ditemukan adalah masih terdapatnya masyarakat yang pasif dalam melaksanakan pertemuan warga sehingga hanya terdapat beberapa masyarakat yang aktif dalam bertanya, menyampaikan saran dan pendapatnya pada saat kegiatan pertemuan dan diskusi yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan beserta warga di Kelurahan Gates Nan XX

- c. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat sudah berpartisipasi secara penuh mulai dari penunjukan tukang/ pekerja yang akan memperbaiki atau membangun rumah mereka, proses pembangunan dimana masyarakat ikut serta dalam proses tersebut, dan juga pada tahap ini masyarakat sebagai penerima bantuan juga terlibat dalam proses perancangan perbaikan rumah mereka. Pada tahap ini juga partisipasi masyarakat juga diperlihatkan dalam kelompok penerima bantuan dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Masyarakat di kelurahan ini aktif berpartisipasi dalam melaksanakan sistem tersebut dengan melakukan gotong royong dan saling berkomunikasi melalui *WhatsApp Group* yang dimilikinya. Tetapi pada tahap ini terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat yaitu mengenai upah tukang yang dinilai mereka tidak sesuai sehingga terdapat masyarakat yang mengambil solusi untuk meminta bantuan kepada keluarga mereka dalam mengerjakan rumah mereka untuk menekan upah tukang yang dikeluarkan. Selain itu juga terdapat kendala mengenai waktu pengerjaan yang kurang lebih sekitar 6 minggu pelaksanaan yang

dianggap terlalu cepat sehingga masyarakat khawatir mengenai kualitas rumah yang mereka bangun karena adanya rentang waktu yang singkat tersebut dalam proses pembangunan.

- d. Tahap Pemanfaatan, dalam tahapan ini merupakan tahap terakhir pada mekanisme pelaksanaan program BSPS. Dalam tahap ini masyarakat memperoleh manfaat mengenai partisipasi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pemanfaatan ini masyarakat sudah memanfaatkan hasil yang diperolehnya yaitu rumah dengan kriteria layak huni.

4.2 Saran

1. Kepada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana tugas yang menaungi program BSPS tingkat kabupaten/kota agar lebih mempertimbangkan tenggat waktu pelaksanaan program BSPS di suatu wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan dari hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan, masyarakat sebagai penerima program mengkhawatirkan pelaksanaan dengan tenggat waktu yang dinilai terlalu singkat sehingga dikhawatirkan dalam proses pembangunan nantinya tidak berjalan secara maksimal. Selain itu jumlah nominal bantuan yang dinilai masih kurang oleh masyarakat baik itu jumlah untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang. Hal ini dikarenakan masyarakat mengeluhkan jumlah biaya yang dinilai kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah dan membayar upah tukang yang menggunakan sistem bertahap dalam pembayarannya, sehingga masyarakat merasa hal ini dapat

membebani mereka dan masyarakat mengeluarkan dana yang lebih lagi untuk mencukupi kekurangan dana pada program tersebut.

2. Kepada pemerintahan tingkat kelurahan, diharapkan untuk ikut terlibat dalam proses pelaksanaan program BSPS. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerintahan tingkat kelurahan hanya terlibat dalam pelaksanaan persiapan dengan mensurvey dan mendata calon penerima program hingga membantu dalam proses administrasi saja, sehingga pada saat proses pembangunan masyarakat hanya diawasi oleh tenaga fasilitator lapangan dan pemerintahan tingkat kelurahan diharapkan ikut serta untuk mendampingi masyarakat pada tingkat kelurahan sehingga pihak kelurahan memahami dinamika masyarakat yang terjadi pada saat pelaksanaan program BSPS di lokasi mereka.
3. Kepada masyarakat lebih terlibat aktif ketika dilakukannya kegiatan sosialisasi dan pertemuan warga dengan memberikan ide, saran, dan masukan terhadap pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan program BSPS selanjutnya yang dapat berakibat pada terhambatnya proses pelaksanaan program.

